



Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

**PERLINDUNGAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**AGUSTIAN ANGGA SAPUTRA
NIM. 1911150010**

**PERLINDUNGAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

**AGUSTIAN ANGGA SAPUTRA
NIM. 1911150010**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2025 M/ 1446 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

Web: iainbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Agustian Angga Saputra Nim 1911150010 dengan judul "Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. John Kenedi, SH., M. Hum
NIP. 196205031986031004

Bengkulu, Januari 2025

Pembimbing II

Edi Mulyono, M. E. Sy
NIP. 19890512202012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Agustian Angga Saputra, NIM 1911150010**
dengan judul **"Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah"**, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : **Jum'at**

Tanggal : **24 Januari 2025**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

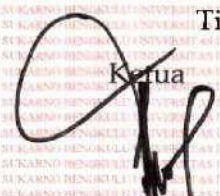
Bengkulu, Januari 2025
Dekan Fakultas Syariah

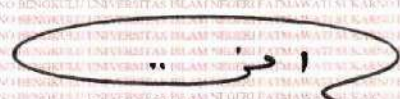

Prof. Dr. Suwarjin, M. A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

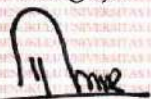
Sekretaris

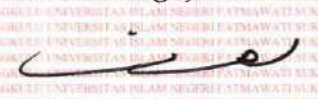

Prof. Dr. H. John Kenedi, SH., M. Hum
NIP. 196205031986031004


Anita Niffilayani, M. H. I
NIP. 198801082020122004

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. Suwarjin, M. A
NIP. 196904021999031004


Etry Mike, M. H
NIP. 198811192019032010

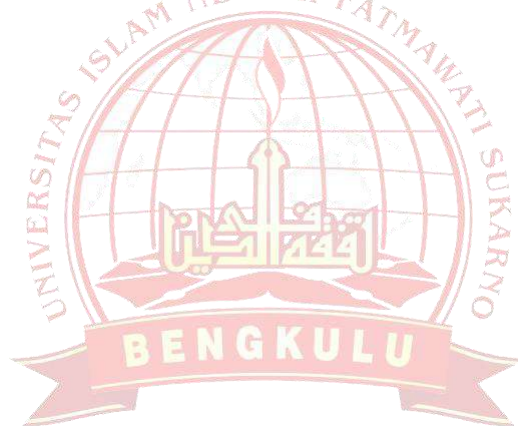
MOTTO

*“ Boleh jadi keterlambatanmu dalam satu tujuan adalah keselamatanmu,
Boleh jadi tertundanya keinginanmu adalah satu keberkahan ”*

(Habib Umar Bin Hafidz)

*“ Terlahir untuk kuat, setiap tetes keringat orangtuaku adalah langkahku
untuk maju ”*

(Agustian Angga Saputra)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayah-Nya Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, kesabaran, pemikiran dan ilmu sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, serta skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayah Hurairah dan Ibu Nurhasana. Terimakasih atas do'a, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat, serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Saudara kandungku dang Iwan, inga Lina, dan docik Dede serta kakak iparku kak Mawardi, ayuk Nia dan ayuk Eli yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan do'a.
3. Kelima keponakanku Tama, Farhan, Marsyah, Fahri, dan Jihan yang selalu memberikan keceriaan didalam keluarga.
4. Semua Keluarga Besar datuk H. M. Nuh (Alm) dan Nenek Hawa (Alm) serta keluarga datuk Maliki (Alm) dan nenek Rukaya yang selalu mendoakan kebaikan untuk kesuksesanku.
5. Kakak sepupuku donga Een dan Ayuk Dewi yang selalu memberikan support baik dalam pendidikan dan pekerjaan.
6. Teman seperjuanganku HTN angkatan 2019.
7. Untuk seluruh dosen HTN yang telah membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh manusia yang memberikan masukan baik padaku.
9. Almamater Kebanggaanku UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis skripsi yang berjudul: **"Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis Skripsi ini murni gagasan, pemikiran serta ide saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari orang lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis, kecuali dikutip secara tulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2025



Agustian Angga Saputra
NIM: 1911150010

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH oleh: Agustian Angga Saputra, NIM:1911150010.

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah hak politik bagi mantan terpidana. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) memegang peranan penting dalam menjamin keadilan konstitusional melalui pengujian undang-undang yang dapat membatasi hak politik tersebut. Dalam pembahasan perlindungan hak politik mantan terpidana, penulis membaginya dalam bentuk poin, sebagai berikut: Hak Politik dalam Perspektif Hukum Indonesia, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Politik, Yurisprudensi MK tentang Hak Politik Mantan Terpidana, Implikasi UU MK terhadap Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana, Tantangan dalam Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi 2 Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Ada tujuan dalam skripsi ini, yaitu: 1. Untuk mengetahui Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi 2. Untuk mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa perlindungan hak politik mantan terpidana di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam implementasi prinsip nondiskriminasi dan rehabilitasi sosial. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, negara wajib menjamin hak politik warganya, termasuk mantan terpidana, sepanjang tidak membahayakan kemaslahatan umum. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk berpolitik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi terkait perlu diperkuat untuk memberikan jaminan hukum yang lebih jelas terhadap hak politik mantan terpidana, tanpa mengesampingkan asas kehati-hatian dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup harmonisasi undang-undang terkait dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi sosial bagi mantan terpidana.

Kata kunci: Hak Politik, Mahkamah Konstitusi dan Siyasah Dusturiyah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasa Dusturiyah”**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M. Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Prof. Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Edi Mulyono, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketulusan.
5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik dalam skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Januari 2025
Penulis

Agustian Angga Saputra
NIM: 1911150010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Penelitian Terdahulu.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Demokrasi	29
B. Teori Hak Politik	36
C. Teori Hak Asasi Manusia.....	39
D. Teori Siyasah Dusturiyah	50
BAB III PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi	65
B. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi	82
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	